

**DILEMA EKONOMI-POLITIK PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
DI SULAWESI SELATAN (1924-1945)**

NAJIRAH AMSI

*Dosen Pendidikan Sejarah & Antropologi, STKIP Hatta-Sjahrir**Email: naj-ira@yahoo.co.id***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kebijakan ekonomi Jepang di Sulawesi Selatan tentang pertanian padi. Menganalisis proses implementasi kebijakan ekonomi pertanian padi. Menjelaskan akibat dari kebijakan sosial ekonomi pertanian padi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan berkaitan dengan upaya Jepang untuk menguasai Asia Timur Raya dengan ideologi fasis yakni Satu Negara, Satu bangsa, Satu Pemimpin. Slogan ini mengantar bangsa Jepang menduduki daerah-daerah sekitar Sulawesi yang dicitrakan bahwa sesungguhnya Sulawesi Selatan tidak mengalami serangkaian kebijakan Jepang dalam Ekonomi. Argumentasi ini didukung oleh beberapa sejarawan seperti Meztika zed, bahwa menurutnya Sulawesi Selatan hanya dijadikan sebagai daerah pertahanan bagi serangan sekutu. Akan tetapi argumentasi tersebut tidak sepenuhnya benar, karena melihat fakta yang ada, bahwa Sulawesi Selatan yang merupakan pertahanan dari infiltrasi sekutu, hanya mempunyai 2 daerah pertahanan yakni di Tator dan Makassar. Sementara daerah Sulawesi Selatan ketika itu memiliki 6 Ken kanrikan dan 25 Bunken kanrikan. Ada beberapa pusat pertahanan yang dibangun Jepang di beberapa tempat seperti Pinrang dan Bantaeng, tetapi tidak selesai. Mereka hanya membentuk pusat pertahanan sementara. Pembentukan tentara Heiho dan Seinendan yang relative sedikit, membuktikan bahwa daerah Sulawesi Selatan sepenuhnya bukan tempat offensif bagi Jepang. Keberadaan Jepang di Sulawesi selatan dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal yakni pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua faktor itu, mengiring Jepang menguasai daerah-daerah yang mampu menopang upaya militernya di Asia. Faktor penting bagi Jepang ketika berkuasa di Sulawesi Selatan adalah pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan ini diprioritaskan pada upaya pemenuhan beras / padi guna kelangsungan hidup tentara militernya.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pendudukan Jepang, Padi, Petani*

PENDAHULUAN

Pada tahun 1924, Jepang untuk pertama kali menduduki Indonesia tepatnya Indonesia bagian timur, Kepulauan Borneo. Menurut Meztika Zed, Jepang menguasai kepulauan Borneo, Kalimantan Timur untuk mendapatkan sumber-sumber minyak, sementara Sulawesi (pusat pendudukan Jepang di Indonesia Timur, ketika itu, hanya sebagai tempat pertahanan dari serangan sekutu¹. Lebih lanjut dalam studi Meztika Zed, menyatakan bahwa Sumatra dan Jawa (Indonesia Barat) merupakan sentra politik dan militer untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya manusia dan bahan pangan (Zed, 2005: 13-14). Sesungguhnya konsep yang dikemukakan oleh Meztika Zed menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan sebagai daerah pertahanan belum mengandung sumber yang akurat. Olehnya itu, penelitian ini hadir, untuk melengkapi sumber tersebut, bahwa Sulawesi Selatan selain sebagai daerah pertahanan juga merupakan wilayah yang berorientasi ekonomi.

Penguasaan militer Jepang di Sulawesi Selatan untuk menduduki wilayah-wilayah bertujuan menopang kebutuhannya, olehnya itu Jepang menerapkan kebijakan yang agresif dan tidak mengenal kompromi (Raben: 2004). Hal tersebut nampak ketika Jepang mengeluarkan seperangkat aturan. Aturan ini tertuang dalam bentuk undang-undang yang termaktub dalam *Osume seirei*. Salah satu isi aturan *Osamu Seirei* berupa hukuman militer kepada warga sipil jika tidak patuh terhadap Balatentara dai Nippon². Sehingga masyarakat kurang menyukai

¹ Setelah Belanda menyerah tanpa syarat, Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah pendudukan militer Jepang yaitu: pertama, Jawa dan Madura yang berada dibawah pemerintahan Komandan Balatentara Jepang (Rikugun) ke-16 berkedudukan di Batavia (Jakarta); kedua, Sumatera yang berada dibawah pemerintahan Komandan Balatentara Jepang (Giyugun) ke-25 berkedudukan di Bukittinggi dan ketiga, kepulauan lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku dan Irian Jaya berada dibawah pemerintahan Angkatan Laut Jepang (Kaigun) armada selatan ke-2 berpusat di Makassar.

² Pasal 4: Sekalian pegawai dan penduduk biasa diwajibkan menurut perintah Balatentara Dai Nippon dan pembesar-pembesar pemerintahan dai Nippon. Balatentara Dai Nippon akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia kepada Dai Nippon, begitu juga jiwa, harta benda yang sah dan agama sekalian rakyat yang tidak berdosa. Sekalian pegawai dan rakyat umumnya hendaklah mempercayai Balatentara dai Nippon dan dengan segera melakukan kewajibannya masing-masing seperti sedia kala. Akan tetapi barang siapa yang

keberadaan Pemerintah Jepang yang cenderung agresif dan militan tersebut, karena aturan yang diterapkan menunjukkan cara yang keras dan disiplin. Kebencian pribumi terhadap pemerintah Jepang umumnya tidak frontal, kecuali di Bone dan Jeneponto³.

Pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan mempengaruhi kondisi ekonomi rakyat pribumi. Jepang memprioritaskan pada ekonomi pertanian padi. Hal ini menjadi amat penting bagi pendudukan Jepang, karena persediaan beras bagi tentara militernya mengalami kekuarangan akibat perang dengan sekutu⁴. Jepang kemudian mengeluarkan aturan ekonomi dan menyusun program-program pertanian yang melibatkan sebahagian besar petani. Rakyat dimobilisasi untuk memperoleh kekayaan sumber daya alam di daerah pedesaan.

Dalam memenuhi kebutuhan beras secara berkelanjutan, Jepang membentuk sebuah organisasi pembelian padi yakni *Kumiai*⁵ dan organisasi distribusi barang, *Haikyu Kumiai*⁶. Badan/ organisasi yang didirikan Jepang seperti *Kumiai* dan *Haikyu Kumiai* memiliki konsekuensi logis dalam proses implementasi. *Kumiai* merupakan koperasi bentukan Jepang yang kemudian mendapat reaksi psikologis maupun fisik dari rakyat pribumi. Peran *kumiai* dalam hal ini menjadi indikasi

melanggar perintah Balatentara dan Pembesar-pembesar Dai Nippon, atau mengacau keamanan umum, menghalang-halangi pekerjaan militer, mengganggu atau menganiaya penduduk bangsa Nippon, dengan sembunyi berhubungan dengan musuh, mengacau keungan dan perekonomian, menyembunyikan harta benda dan barang bahan ataupun merusakkan sumber kekayaan tanah, pabrik-pabrik dan sebagainya akan dihukum berat menurut Undang-Undang hukum militer. Surianingrat dkk, *Himpunan Peraturan Perundangan mengenai Pemerintahan Daerah 1972* : 433 dan Pemerintahan Propinsi Daerah ..., 1991: 209.

³ Kasus Pemberontakan di Bone sesungguhnya merupakan bentuk respon resisten dari pribumi atas kebijakan Jepang yang cenderung menindas para petani padi. Sementara di Jeneponto memiliki gejala yang sama dengan kasus yang ada di Bone.

⁴ Kekuarang beras yang dialami Jepang berawal pada tahun 1940. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman, kemudian Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dengan mengalihkan ekspor (Barang ekspor termasuk beras, minyak bumi dan batu bara) untuk Jepang ke AS dan Britania. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri, maupun untuk keperluan perang.

⁵ Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, Jakarta: 1978. hal: 94.

⁶ Badan yang dibangun Jepang untuk mendistribusikan beras dan tekstil dari desa ke kota bagi para pekerja.

kuat munculnya reaksi negatif dari rakyat pribumi. Olehnya itu, menjadi penting membahas peran organisasi tersebut dalam kaitannya dengan padi dan atau beras. Respon rakyat petani terhadap kebijakan tersebut sangat beragam.

Keadaan petani cenderung tertindas ini nampak pada kasus yang ditemukan di Barru, bahwa Jepang ketika berkuasa memperkerjakan pribumi dengan sistem kerja yang padat dan disiplin. Selain sebagai petani padi mereka juga dimobilisasi untuk mendirikan benteng pertahanan. Sementara itu rakyat tidak diberi upah dalam usaha pembangunan benteng. Bahkan hasil pertanian diambil sebanyak-banyaknya dan ternak rakyat dibeli dengan harga yang rendah⁷. Masalah beras atau padi menimbulkan dampak serius bagi rakyat pribumi, tidak hanya dalam bentuk perlawanan fisik akan tetapi juga berdampak psikologis. Rakyat menjadi miskin dan kelaparan.

Strategi politik, ekonomi, pendidikan dan sosial selama periode pendudukan, dengan demikian, merupakan bagian dari strategi kebijakan yang sengaja dilakukan Jepang kepada pribumi semata untuk mendapatkan simpati dan dukungan rakyat pribumi demi mencapai kemenangannya. Strategi ini di topang oleh aturan yang justru menindas dan menyengsarakan rakyat pribumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, namun tidak mengabaikan sumber yang kuantitatif. Relevansi signifikan pada ilmu antropologi adalah interpretasi simbolik.

Selanjutnya, data-data yang akan digunakan ada dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer seperti arsip, meliputi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pusat dan daerah, juga sumber-sumber lisan yang telah didokumentasikan dan atau hasil sejarah lisan (sumber dari pengkisah), serta

⁷ Lihat dalam *Lembaran Deskripsi dan Transkripsi Kaset Sejarah Lisan Jepang Sulawesi Selatan*. Oleh Pusat Kajian Multikultural dan Pengembangan Regional Divisi Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Pusat Kegiatan Penelitian Unhas **bekerjasama dengan** Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Tokyo University of Foreign Studies (STUFS). Pewawancara Iping, pendeskripsi Najirah. Kaset No. 08/ Jnpt – Iping/ 12/ 2006

catatan harian pemerintah atau perorangan. Sementara sumber sekunder, adalah tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian. Antara lain hasil-hasil penelitian seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun sejumlah sumber lisan yang telah ditranskripsi dan transiliterasi didapatkan lewat proyek sejarah lisan Jepang bekerjasama denganm PKP UH merupakan data primer yang sangat membantu dalam proses penulisan ini.

Adapun lokasi penelitian ini pada daerah-daerah tertentu di wilayah kabupaten Sulawesi Selatan, artinya tidak diarahkan untuk seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Jika studi Lucas tentang “Tiga Daerah” merupakan daerah konfrontasi, maka dalam penelitian ini fokus daerah yang non-kofrontasi. Yaitu pada wilayah-wilayah yang memang sedapatnya mampu memberikan informasi lisan dari pengkisah yang sejaman dengan pendudukan Jepang. Ada sejumlah wilayah yang telah dikelompokkan oleh Rasyid Asba, dalam Katalog Sejarah Lisan Jepang di Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh Tokyo University kerjasama dengan Pusat Kegiatan Penelitian Unhas, menyatakan bahwa daerah pertanian lebih dominant ditemukan di di Kabupaten Bone, Wajo, Barru, Bantaeng dan Palopo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pertanian Jepang yang dikenal *Kinkyu Shokuryo Taisaku* (Tindakan-Tindakan Mendesak Mengenai Bahan Makanan) meliputi empat hal antara lain: (1) Pengenalan Jenis padi baru, (2) Inovasi teknik-teknik penanaman, (3) Peningkatan infrastruktur pertanian, (4) Perluasan sawah, (5) Propaganda dan latihan yang ditujukan bagi petani (Kurasawa 1991:7) Kelima bagian tersebut, akan menghubungkan bentuk-bentuk kebijakan terhadap rakyat setempat dengan menggunakan media atau instrument, yang salah satunya adalah penguasaan lahan.

Penguasaan lahan

Sebagaimana dilukiskan diatas, petani dipaksa supaya menyerahkan sejumlah besar padi yang mereka hasilkan, dan dilain pihak mereka tidak mampu membeli beras di pasar. Yang membuat membuat kebijakan ini terasa berat ialah umumnya petani terbiasa menghasilkan padi secukupnya untuk komsumsi mereka sendiri, dan sedikit sekali yang dijual ke pasar. Karena hal itu, mereka tidak memiliki kontrol penuh atas hasil panen mereka sendiri.

Petani menderita kemiskinan yang kronis karena mereka hampir selalu diwajibkan untuk menyerahkan padi kepada pemerintah Jepang, belum termasuk utang yang harus dibayarkan kepada pemilik tanah yang disewa. Karena kebanyakan tanah yang digarap oleh petani padi merupakan tanah milik para pejabat pemerintah Jepang, pemilik tanah adalah para pejabat desa (kepala desa) atau bangsawan.

Tanah yang digunakan petani sebagai lahan pertanian padi, telah di bebaskan dari hak kepemilikan kepala desa atau bangsawan dari pemerintah Jepang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa informan bahwa tanah yang digunakan Jepang untuk menggarap tanah menjadi sawah atau perkebunan secara subtransi dibayar oleh pihak Jepang atau dilakukan ganti rugi. Akan tetapi ganti rugi yang dimaksud tidak dijelaskan lebih lanjut.

Kemungkinan pertama, bahwa pembebasan hak kepemilikan diatur kedalam sistem bagi hasil, yang dimungkinkan merupakan ganti rugi. Misalnya Jepang menentukan kuota tersendiri, dan pejabat lokal diberi kebebasan untuk mendapatkan hasil dari lahan milik pejabat desa yang dipergunakan oleh petani. Akibatnya pejabat desa, mau tak mau harus melakukan pemerasan terhadap petani. Kemungkinan kedua adalah pembebasan lahan dengan menggunakan pembayaran fasilitas, seperti pembayaran dengan menggunakan kain impor dari Jepang. Senada yang ditulis oleh Wall ” Salah satu tokoh bangsawan Andi. Makkulau, putra Datu Luwu menerima sebuah pemberian galangan kapal bersama f 50.000 uang tunai dan beberapa ratus bundle kain dari tentara Jepang (Van der Wall, 1971).

Peran "Kumiai" (Organisasi Distribusi Beras)

Kumiai, merupakan salah satu lembaga kontrol pemerintah Jepang untuk mengawasi petani dalam distribusi beras. Strategi yang ditempuh pemerintah turut melibatkan pribumi sebagai perangkat dari program pemenuhan pangan. Pemenuhan pangan diutamakan adalah beras. Kumiai bertindak sebagai unit dasar untuk memanipulasi seuruh struktur perekonomian yang dikendalikan semasa perang.

Tujuan resmi pembentukan koperasi ini ialah melindungi kepentingan ekonomi pribumi Indonesia yang terancam oleh orang asing serta membantu perkembangan industri nasional, namun keinginan sesungguhnya dari pihak Jepang tidak lain adalah untuk memperkuat cengkraman mereka atas kegiatan ekonomi pribumi serta atas orang Cina.

Jepang memerintahkan supaya setiap kelompok kejuruan harus menyelenggarakan satu koperasi, sehingga seluruh wiraswasta yang ada, besar dan kecil, bisa dikontrol lewat ini. Kesertaan mereka merupakan paksaan. Pabrik yang tidak bergabung ke dalam koperasi yang tepat tidak diberi pemasokan barang atau penyaluran produk mereka, dan pemilik toko tidak dikirim barang jika tidak bergabung ke dalam koperasi.

Dengan demikian, koperasi diselenggarakan hampir di semua bidang perpabrikaan, pertanian dan perdagangan. Misalnya pembentukan koperasi produsen beras, pemilik penggilingan beras, pedagan besar, penanam sayur, dan nelayan.

Koperasi semacam ini memiliki istilah yang beragam seperti NKK untuk pertanian, NBS untuk perkebunan, LTD bidang perikanan, Kanebo untuk kapas,⁸. Koperasi ini umumnya dipimpin oleh seorang *nogyo kumiai* yang bertugas sebagai penyuluh pertanian. Fungsi *Nogyo Kumiai* antaran lain:

1. Memberi tuntutan dalam kegiatan pertanian serta menjalankan survei-survei pertanian
2. Pembangunan dan manajemen gudang tanaman

⁸ Asba, 2006: 9, 200, 213.

3. Pengumpulan, penjualan dan pengangkutan hasil bumi
4. Pembelian bersama alat-alat pertanian dan kebutuhan sehari-hari
5. Lain-lain⁹

Perencanaan dan persiapan koperasi pertanian dilakukan dimasing-masing kresidenan atau ditingkat kecamatan dan *soncho* bertindak sebagai ketuanya. Tiap kebijakan ditentukan dengan prakarsa dan kebijakan mereka sendiri. Setiap cabang mempunyai unit pada tingkat desa dan diawasi oleh kepala desa, atau *ku cho*.

Sementara itu, ada organisasi terpisah yang disebut sebagai *haikyu kumia*. Haikyu kumia bertugas untuk mendistribusikan barang, umumnya operasi ini berada di wilayah *soncho* atau kecamatan. Ia tidak mempunyai cabang di desa. Akan tetapi pada dasarnya penduduk desa beranggapan sama bahwa haikyu kumia maupaun kumiai sesungguhnya merupakan lembaga milik pemerintah Jepang yang beropresai di bidang pertanian khususnya komoditi padi atau beras.

Pada program distribusi beras, diberlakukan sebuah jenis kartu ditribusi bagi penduduk pribumi. Pembagian kartu dilakukan oleh *kucho* dan *tonirugami*. Akan tetapi pembagian kartu tersebut tidak merata menurut sumber dalam pewarta selebes bahwa pembagian tersebut hanya ditujukan kepada keluarag *kucho* ataupun *tonrugami*, jika ada lebihnya baru kemudian diberikan kepada masyarakat (Van der Wall, 1971).

Seorang informan menyatakan bahwa ada sejenis kartu yang dibagikan Jepang kepada masyarakat untuk ditukar dengan beras, gula, garam dan pakaian. Akan tetapi pembagian ini tidak berkala dan biasanya juga tidak merata sehingga banyak warga mengalami kekurangan makanan dan menderita kelaparan¹⁰.

Akan tetapi, mereka tidak mampu melakukan bentuk perlawanan apapun sebab menurutnya mereka akan mengalami penyiksaan dari para pemerintah Jepang. Praktis mereka hanya mampu menerima perlakuan dari pihak Jepang yang semula baik kemudian berubah menjadi arogan.

⁹Kurasawa, 1998: 211

¹⁰Hasil wawancara bersama Anonim, Agustus 2007 di Makassar. Beliau berasal dari Kab.Wajo desa Rumpia.

Krisis Ekonomi Sul-Sel Periode Jepang

Dalam situasi ekonomi yang relative baik masa pemerintahan Belanda terutama dalam hal kebutuhan pangan, dapat ditangani, berbeda keadaanya setelah Jepang menguasai Sulawesi Selatan. Perubahan tersebut sangat nampak pada kondisi ekonomi yang mempengaruhi keadaan sosial pribumi.

Perubahan tersebut meliputi tiga faktor, *pertama* Hindia Belanda (Indonesia) terutama Sulawesi ditarik keluar dari Ekonomi Eropa Barat dan dijadikan bagian dari ekonomi wilayah kekuasaan Jepang yang mengalami blokade sekutu. Kedua, kesatuan pemerintah di pecah-pecah, dan ketiga ekonomi Sulawesi secara modern berada di bawah kekuasaan Jepang yang berorientasi kepentingan Jepang.

Perubahan pertama berarti ekonomi secara penuh dikontrol oleh Jepang. usaha perkebunan Belanda, dihentikan jika tidak berarti ekonomis bagi pemerintahan Jepang. Akibatnya, perusahaan perkebunan ditutup, dan diganti dengan penanaman jenis bahan makanan yang berguna bagi pemerintahan Jepang. hutan-hutan digunduli untuk pembukaan lahan pertanian di Sulawesi selatan seperti di Palopo dan Bulukumba. Hubungan pasar internasional antar pulau berangsur terhenti, Jepang yang menggunakan transportasi perahu antar pulau banyak mengalami kerusakan. Serbuan torpedo kapal selam Amerika tahun 1943 mempengaruhi siklus ekonomi di Sulawesi yang menurun. Kekurangan pangan dan sandang semakin memburuk.

Perubahan kedua adalah terpecahnya kesatuan pemerintah, yakni Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Ketiga daerah ini masing-masing dikuasai oleh Tentara Angkatan Darat Jepang (di Jawa dan Sumatera) dan tentara angkatan laut Jepang. (Sulawesi dan Kalimantan). Ketiga daerah tersebut masing-masing mendahulukan kepentingan wilayah yang dikuasai. Interaksi ketiga wilayah yang semula harmonis dalam pengiriman dan pertukaran barang, berakhir ditangan Jepang dengan menutup atau memberhentikan kegiatan pasar tersebut. kecuali dibutuhkan untuk kepentingan Jepang sendiri. Kebijakan Jepang, telah membawa penderitaan bagi

pribumi, tidak hanya kekurangan bahan makanan akan tetapi juga kekurangan pakaian. Di Jeneponto telah diproduksi garam begitu banyak, tapi hasilnya berada di gudang penyimpanan Jepang. Sementara di Selayar mampu mengekspor beras untuk daerah sekitar, akibat kebijakan Jepang yang tertutup mengakibatkan kekurangan terjadi dimana-mana.

Perubahan ketiga, adalah kegiatan ekonomi secara modern dikuasai oleh Jepang dan untuk kepentingan Jepang. Berarti bahwa kegiatan ekonomi dikontrol dan di mobilisasi sedemikian rupa agar tetap berorientasi Jepang. salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun lembaga kontrol pendistribusian padi atau beras yakni *kumiai*. Kontrol ini lebih diperketat dengan mendirikan bermacam-macam bentuk lembaga sosial, seperti *torigami*, *nogyo shidoin*, *kucho* dan sebagainya.

Respon Petani

Respon Kompromis. Kebijakan pemerintahan Jepang mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari terutama sandang dan pangan. Adanya monopoli perdagangan beras oleh Jepang menyebabkan kelangkaan beras di masyarakat. Jepang membeli beras di masyarakat dengan harga murah dan melarang adanya penjualan kecuali melalui Jepang.

Kebijakan Jepang tersebut mengakibatkan sejumlah petani gerah terhadap pejabat pribumi yang oleh Jepang diperkerjakan mengurus pertanian, *Shidoin*, seperti yang dideskripsi oleh Lukman, hasil wawancara Man Arfah dengan seorang informan yang bernama H. Wero¹¹ mengatakan bahwa “ keadaan masyarakat pada masa Jepang sangat menderita, karena padi yang merupakan makanan pokok pribumi diambil oleh orang Indonesia sendiri atas perintah Jepang”

¹¹ Hasil dari informan (H. wero) telah meninggal dunia 2007, diwawancarai pada tahun 2005 oleh Man arfah, pendeskripsi Lukman, dikutip dari katalpg sejarah lisan Jepang di Sulawesi Selatan 2006.

Atas nama pemerintah Jepang, para *Nogyo Shidojin*, *Kucho* (kepala Desa), bersama pejabat desa lainnya (seperti mandor), memeras para petani padi untuk menanam, memanen, dan menyerahkan hasil mereka dengan jumlah yang relative besar. Mereka juga sebahagian diinstruksikan selain menanam padi juga dianjurkan menanam tanaman yang diperlukan Jepang ketika itu, antara lain kapas untuk pakaian, sayur-sayuran untuk pangan dan kayu untuk kebutuhan perahu.

Instruksi kilat Jepang tersebut mengakibatkan sejumlah petani gerah terhadap pejabat pribumi yang oleh Jepang diperkerjakan mengurus pertanian, *Shidojin*, seperti yang dideskripsi oleh Lukman, hasil wawancara Man Arfah dengan seorang informan yang bernama H. Wero¹² mengatakan bahwa “keadaan masyarakat pada masa Jepang sangat menderita, karena padi yang merupakan makanan pokok pribumi diambil oleh orang Indonesia sendiri atas perintah Jepang”.

Respon Resistensi. Respon beragam yang ditunjukkan rakyat Sulawesi Selatan tidak selalu bersifat kompromi, akan tetapi juga bersifat resisten. Hal tersebut nampak dari adanya beberapa peristiwa pemberontakan. Pemberontakan tersebut merupakan respon negatif rakyat petani terhadap pemerintah Jepang. Seperti pemberontakan petani Bone di Unra.

Pemberontakan itu bermula dari perlakuan pejabat desa yang bernama A. Manuhung dan Sulewatang serta beberapa polisi mendatangi desa Unra. Polisi dan aparatnya kemudian mencari dan mengambil dengan paksa padi-padi yang disimpan petani diatas loteng (rakkeyang), dan kemudian membuangnya ke tanah. Kejadian semacam itu, membuat berang para petani, karena tindakan tersebut sangat dilarang dalam adat dan budaya (pamali). Karena padi merupakan sumber kehidupan dan makanan bagi kehidupan manusia. Bertitik tolak dari kenyataan ini, insiden pemberontakan rakyat Unra muncul kepermukaan. Pemberontakan inipun meletus ketika salah seorang penduduk Unra bernama I Banna belum menyetor semua tunggakan yang dibayarkan, ia kemudian diperintahkan untuk menumbuk padi guna

¹² Informan (H. wero) telah meninggal dunia 2007, diwawancarai pada tahun 2005 oleh Man arfah, pendeskripsi Lukman, dikutip dari katalog sejarah lisan Jepang di Sulawesi Selatan 2006.

menebus kekuarnagn padi yang belum disetor. Namun kondisi I Banna yang sudah renta tidak mampu menumbuk padi di saksikan oleh warga lain yakni I pagga. I pagga kemudian mendatangi Andi Dambu kepala onder distrik Jaling ketika peristiwa tersebut terjadi. Saat itu I pagga melawan tetapi mereka di tangkap oleh tentara heiho atas perintah Andi Dambu.

Gerakan Kepemudaan

Mulai saat itu, pada pertengahan tahun 1944, pendirian *kaigun* dan *heiho* (pasukan pembantu angkatan laut) juga dilakukan di Sulawesi Selatan. Akan tetapi yang banyak disiapkan secara fisik adalah melalui *Seinendan*. Propaganda yang dilakukan Jepang menarik rasa simpati penduduk pribumi dengan menyebarkan rasa kebencian terhadap sekutu dan seluruh orang kulit putih.

Suatu langkah selanjutnya menuju militerisasi pemuda Indonesia dilakukan dengan “Boen tei sin Tai”, sejenis penjaga kota Indonesia yang terdiri atas para pemuda berusia 17-20 tahun, dibentuk tahun 1945 ketika terjadi ancaman penyerbuan sekutu atas Indonesia semakin dekat. Saat itu juga semangat kebencian terhadap orang barat semakin dikobarkan. Tetapi ‘Boe Tei sin tai’ hanya bertahan selama beberapa bulan, ketika itu Jepang mendadak menyerah. Organisasi Jepang ini sebaliknya tidak lenyap sama sekali. Mereka muncul dalam bentuk lain. Panglima Jepang di Asia tenggara memberikan kemerdekaan mutlak atas Indonesia kepada Sukarno. Di Sulawesi gerakan nasionalis “Saudara” dirubah menjadi PNI, ketuanya Dr. Ratulangi menjadi gubernur Celebes. Koran melayu *Pewartas Selebes* yang bukan hanya dikontrol oleh Jepang tetapi sampai penerbitan terakhir diilhami oleh mereka, diurbah menjadi “*Suara Merdeka*” sementara *Boe Sin Tai* juga diubah menjadi “Angkatan Muda”. Dengan demikian sebagian besar anggota Heiho ikut bergabung karena korps Heiho dibubarkan. Koran baru *Suara Indonesia* tetap pro Jepang sampai saat pendaratan pertama para perwira sekutu di Makassar sebagai pelopor pasukan pendudukan Australia. Ketika itu sikap anti sekutu diubah menjadi sikap anti-Belanda. Semboyannya saat itu adalah “Hidup Australia”, persetan dengan Belanda” orang-orang hanya

perlu membaca tulisan dari para tokoh dalam *pewarta Selebes* dan dalam *Suara Indonesia* untuk mengetahui betapa besar pengaruh dari semboyan ini.

Sarana utama dari para tokoh nasionalis terutama adalah *Boe Tei Sin Tai*, yang disebut Angkatan Muda. Di setiap daerah penting seperti ibukota afdeling dan onderafdeling, sekelompok orang kira-kira 500 anggota di tampung. Orang-orang ini masih berada di bawah pengaruh Jepang dan menerima senjata dari Jepang. Para pemimpinnya menerima pistol, para anggotanya menerima granat tangan. Di Makassar kepada para anggota *Boe Tei Sin Tai*, dibagikan tangan. Selain itu sebuah tempat penimbunan granat tangan, dinamit dan bom Molotov ditemukan dan disita oleh polisi melalui kerjasama dengan tentara Australia. Mereka semua adalah orang Jepang yang memahami bahasa Melayu dan mengenal kejiwaan orang Indonesia. Mereka bepergian dengan berbusana seperti orang Indonesia, dengan kopiah dan sarung. Yang paling terkenal adalah Kondo (informasi dari *pewarta selebes*), I Keja, Arantami (dari polisi rahasia), Kubota dan sebagainya.

Pada tanggal 1 September fungsi pemerintah sampai pada tingkat tertinggi diserahkan kepada orang-orang Indonesia, tetapi para eks aparat Jepang tetap menduduki posnya. Tidak ada lagi sebutan Jepang seperti Bunken Kanrikan (kontrolir pimpinan onderafdeling) karena jabatan itu telah diisi orang Indonesia. Jepang hanya disebut *hodokan* (pemberi nasehat).

Dari tanggal 12 sampai 14 Oktober 1945, ketika salah seorang Belanda yang bernama Koerts, dalam catatannya: Koerts melakukan perjalanan kewilayah dimana para pemimpin local menolak mengakui Pemerintah Hindia Belanda dan bertahan dibalik Sukarno dan Gubernur selebes Dr. Ratulangi. Tujuan dari perjalanan Koerts adalah menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di Sulawesi dan jika mungkin mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Terbukti pada bahwa di bontain dua hari sebelum kedatangan saya sebuah rapat diadakan dibawah pimpinan orang jepang Kubota, dimana diputuskan untuk bergabung dibelakang di belakang Sukarno dan menangkapi setiap agen Nica.

KESIMPULAN

Keberadaan Jepang di Sulawesi Selatan juga dipengaruhi oleh kondisi internal yakni pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua faktor itu, mengiringi Jepang menguasai daerah-daerah yang mampu menopang upaya militernya di Asia. Satu-persatu daerah ditaklukkan dan dikuasai dengan mengeluarkan beberapa undang-undang peraturan pemerintahan yang tercakup dalam *Osamu seirei*. Aturan ini yang mengikat pribumi untuk tunduk dan takluk. Penaklukan tidak mendapat perlawanan yang berarti dari pribumi kecuali pada sekutu, Belanda. Pertempuran terjadi di sejumlah wilayah dan yang paling parah adalah pertempuran yang terjadi di Maros, yang disebut perang penaklukan Camba.

Faktor penting bagi Jepang ketika berkuasa di Sulawesi Selatan adalah pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan ini diprioritaskan pada upaya pemenuhan beras / padi guna kelangsungan tentara militernya. Program-program pertanian diusahakan di sejumlah daerah. Program ini dituangkan dan dijabarkan oleh Jepang dengan bantuan rakyat pribumi. Bentuk-bentuk penyelenggaraan pertanian disosialisasikan melalui pendidikan, organisasi pedesaan dan lembaga pertanian.

Pendidikan diarahkan pada pengajaran tentang bagaimana mengolah dan menghasilkan komoditi beras yang efektif dan baik. Penyebarluasan doktrin pertanian dengan upaya peningkatan produksi dan sebagainya yang sekait dengan kepentingan Jepang. Keterlibatan organisasi pedesaan seperti kepala desa, tonirugami (kepala rukun tetangga). Mandor tani dan instruktur pertanian. Merupakan bagian integral dari sistem sosial ekonomi Jepang untuk memobilisasi rakyat melalui kontrol ketat tangan kanan Jepang. Para pejabat desa, membentuk lembaga-lembaga efektif dalam rangka memperlancar bentuk penjatahan, penyerahan, distribusi dan lain sebagainya. Lembaga ini disebut *Kumiai* atau sejenis koperasi, akan tetapi tiap daerah mempunyai sebutan berbeda sekaitan dengan istilah tersebut.

Penderitaan petani akibat dari kebijakan ekonomi Jepang membawa dampak serius. Dampak tersebut nampak pada gerakan kompromis dan gerakan resistensi. Reaksi kompromi lebih mengarah kepada pribumi yang bekerja di jajaran pemerintahan Jepang. Sementara reaksi perlawanan nampak pada para petani, yang bersifat psikologis dan fisik. Puncaknya adalah gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Petani di Kabupaten Bone, tepatnya di Unra. Pemberontakan ini merupakan puncak dari ekspresi ketidakpuasan pada pemerintah Jepang yang bertindak sewenang-wenang.

Dengan demikian, Sulawesi Selatan yang adalah selain sebagai tempat defensif bagi Jepang juga merupakan salah satu basis ekonomi. Ekonomi pribumi masa pendudukan Jepang menuai perubahan sosial yang cukup signifikan. Sehingga Pergerakan nasional dan kepemudaan kurang berkembang dan bertumbuh. Baru kemudian menggeliat jelang kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1982. *Lembaran Berita Sejarah Lisan. Nomor 9 Maret 1982.*
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1989. *Lembaran Berita Sejarah Lisan. Nomor 12 Maret 1989.*
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Pusat Kajian Multikultural dan Pengembangan Regional Universitas Hasanuddin dan Tokyo University of Foreign Studies (STUFS). Lembaran Deskripsi dan Transkripsi Kaset Sejarah Lisan Jepang Sulawesi Selatan.
- Van der Wall. 1971. *Indonesische stukken betreffende verhouding tussen Nederland en Indonesia 1945-1949, eerste deel, 10 August – 8 November 1945*, 's Gravenhage.
- Abdullah, Taufik dan Surmihardjo, Abdurrachman. T.th. *Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif*. Diterbitkan dengan kerjasama Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS) dan LEKNAS LIPI, Jakarta: Gramedia
- Asba, Rasyd. (peny). 2006. *Katalog Sejarah Lisan Jepang di Sulawesi Selatan. Pusat Kajian Multikultural dan Pengembangan Regional, Divisi Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Pusat Kegiatan Penelitian Universitas Hasanuddin.*
- Burger. H. D. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*". Djakarta: Pradnjaparamita.
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa Silang Budaya: Kajian Sejarah Terpadu Jilid I, II, dan III* (Diterjemahkan oleh Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat, dan Nini Hidayati Yusuf). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama-Forum Jakarta Paris Ecole Francaise d'Extreme-Orient.
- Lapian, A.B dan Chaniago JR., 1988. *Dibawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang Mengalaminya*. Jakarta: Arsip Nasional Indonesia.
- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol, Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.
- MD, Sagimun. 1989. *Peranan Pemuda Dari Sumpah Pemuda Sampai Dengan Proklamasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Zed, Mestika. 2005. *Giyugun; Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*. Jakarta: LP3ES.